Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (2) 2026, Page: 37139-37149

Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia: Review Literatur Tentang Fragmentasi Kebijakan, Ketepatan Sasaran, Dan Evaluasi Dampak

Ade Saputra[1], Sufian Hamim, Raden Al Hafis[2], Dia Meiriana[3]
Universitas Islam Riau, Indonesia
Email : **ade.apu00@gmail.com**

Published: July , 2026

ABSTRACT

Poverty alleviation programs in Indonesia have expanded through various forms of social assistance, social protection, economic empowerment, and household based interventions. However, the existence of multiple programs does not automatically produce strong and sustainable poverty reduction. This article aims to analyze the implementation of poverty alleviation programs in Indonesia through three main concerns, namely policy fragmentation, targeting accuracy, and impact evaluation, while positioning Riau Province as a supporting regional context. This study applies a literature review method by examining 22 open access journal articles related to the Family Hope Program, social assistance, integrated poverty data, zakat, food assistance, program governance, and policy evaluation. The findings show that the effectiveness of poverty alleviation programs is not merely determined by the amount of assistance or the number of beneficiaries, but also by integrated planning, reliable beneficiary data, cross actor coordination, supervision of fund utilization, and outcome based impact measurement. Several programs have been shown to improve consumption and reduce the economic burden of poor households, yet their effects on structural change, independent graduation, and long term poverty reduction remain uneven. This article concludes that poverty alleviation requires stronger integration between planning, implementation, and evaluation so that social assistance does not remain an administrative response, but becomes a more targeted instrument for improving welfare.

Keywords: *Impact evaluation; Policy fragmentation; Poverty alleviation; Riau Province; Targeting accuracy*

ABSTRAK

Program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah berkembang melalui berbagai skema bantuan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan intervensi berbasis rumah tangga miskin. Namun, keberadaan banyak program belum selalu berbanding lurus dengan penurunan kemiskinan yang kuat dan berkelanjutan. Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui tiga fokus utama, yaitu fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak, dengan Provinsi Riau sebagai konteks penguat analisis daerah. Metode yang digunakan adalah review literatur terhadap 22 artikel jurnal open access yang membahas Program Keluarga Harapan, bantuan sosial, data terpadu kemiskinan, zakat, bantuan pangan, tata kelola program, dan evaluasi kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh besaran bantuan atau jumlah penerima, tetapi juga oleh keterpaduan perencanaan, kualitas data penerima, koordinasi lintas aktor, pengawasan penggunaan bantuan, dan pengukuran dampak berbasis hasil. Beberapa program terbukti mampu meningkatkan konsumsi dan meringankan beban rumah tangga miskin, tetapi dampaknya terhadap perubahan struktural, graduasi mandiri, dan penurunan kemiskinan jangka panjang masih tidak merata. Artikel ini menyimpulkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan integrasi antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi program agar bantuan sosial tidak berhenti sebagai respons administratif, tetapi menjadi instrumen perubahan kesejahteraan yang lebih terarah.

Kata kunci: Evaluasi dampak; Fragmentasi kebijakan; Ketepatan sasaran; Pengentasan kemiskinan; Provinsi Riau

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia tidak dapat lagi dibaca secara sempit sebagai kekurangan pendapatan rumah tangga. Dalam praktik pembangunan, kemiskinan bergerak sebagai persoalan yang lebih rumit karena menyentuh akses pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan sosial, pekerjaan, data kependudukan, kapasitas keluarga miskin, serta kemampuan pemerintah menghubungkan berbagai program dalam satu arah kebijakan yang jelas. Karena itu, program pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dinilai dari ada atau tidaknya bantuan, tetapi harus dilihat dari bagaimana program direncanakan, siapa yang menerima, bagaimana bantuan digunakan, dan sejauh mana program benar benar mengubah kondisi kesejahteraan penerima.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai bentuk intervensi, salah satunya Program Keluarga Harapan atau PKH yang dirancang sebagai bantuan sosial bersyarat untuk mendorong akses keluarga miskin terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Dalam logika kebijakan publik, PKH tidak hanya diarahkan untuk mengurangi beban pengeluaran jangka pendek, tetapi juga untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui investasi modal manusia. Temuan Cahyadi et al. (2020) menunjukkan bahwa PKH memiliki dampak pada sejumlah indikator kesehatan dan pendidikan anak, termasuk peningkatan persalinan dengan tenaga kesehatan, penurunan anak usia di bawah 15 tahun yang tidak sekolah, serta penurunan stunting. Namun, studi tersebut juga menegaskan bahwa peningkatan modal manusia belum otomatis menghasilkan perubahan ekonomi rumah tangga yang bersifat transformatif.

Temuan serupa, tetapi dengan penekanan yang berbeda, terlihat pada studi Hudang et al. (2024). Penelitian tersebut menemukan bahwa PKH berpengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi pangan, tetapi tidak menunjukkan dampak signifikan pada capaian pendidikan anak dan kunjungan prenatal. Artinya, bantuan sosial dapat lebih cepat terbaca pada sisi konsumsi, sementara perubahan pada pendidikan dan kesehatan memerlukan prasyarat lain, seperti kualitas layanan, kepatuhan penerima terhadap komitmen program, pendampingan, dan ketersediaan fasilitas. Dengan demikian, efektivitas PKH tidak dapat dilepaskan dari lingkungan implementasi yang menopang atau justru melemahkan tujuan program.

Literatur lain juga menunjukkan bahwa dampak program pengentasan kemiskinan tidak selalu seragam. Hadna dan Askar (2022) menemukan bahwa PKH berdampak terhadap konsumsi individu berpendapatan rendah, tetapi rumah tangga pada kelompok kesejahteraan terendah belum sepenuhnya memperoleh manfaat optimal karena desain bantuan belum cukup menyesuaikan kebutuhan kelompok paling bawah. Nuryadin et al. (2023) juga menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat mampu meningkatkan pengeluaran konsumsi makanan dan nonmakanan rumah tangga miskin, dengan pengaruh yang lebih kuat pada wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Perbedaan hasil ini memperlihatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh skema bantuan, tetapi juga oleh karakter wilayah, kapasitas rumah tangga, dan ketepatan desain program terhadap masalah yang dihadapi penerima.

Berdasarkan perkembangan literatur tersebut, studi tentang pengentasan kemiskinan di Indonesia telah bergerak dari sekadar membahas keberadaan program menuju penilaian yang lebih kritis terhadap dampak, sasaran, dan konteks implementasi. Namun, pembacaan yang hanya menekankan dampak program masih menyisakan masalah. Program bisa saja meningkatkan konsumsi, tetapi tetap gagal menciptakan graduasi mandiri. Program dapat tersalurkan secara administratif, tetapi tetap bermasalah jika penerima tidak tepat. Program juga dapat terlihat aktif di banyak sektor, tetapi kehilangan daya ubah jika koordinasi antaraktor lemah. Oleh karena itu, artikel ini menempatkan fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak sebagai tiga pintu masuk utama untuk membaca ulang implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Masalah lain yang sering menentukan keberhasilan program pengentasan kemiskinan adalah ketepatan sasaran. Literatur tentang bantuan sosial di Indonesia menunjukkan bahwa persoalan sasaran bukan sekadar masalah administratif, tetapi menyangkut keadilan distribusi, efektivitas anggaran, dan legitimasi program. Kusumawati (2019) menegaskan bahwa salah sasaran dalam program transfer sosial dapat muncul melalui dua bentuk, yaitu keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak tercakup, dan keluarga yang tidak layak tetapi justru masuk sebagai penerima. Masalah ini menjadi semakin penting karena banyak program perlindungan sosial bergantung pada data penerima yang harus selalu diperbarui.

Dalam konteks tersebut, Widyaningsih et al. (2023) menunjukkan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi basis utama untuk menentukan calon penerima program perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, tidak semua pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala. Akibatnya, ketidaktepatan sasaran dan keterlambatan bantuan masih terjadi dalam pelaksanaan berbagai program. Temuan Sofianto (2020) memperkuat persoalan ini melalui studi PKH di Jawa Tengah. Implementasi PKH dinilai cukup baik secara prosedural dan manajerial, tetapi sasaran program masih lemah karena data tidak valid. Dengan kata lain, program dapat berjalan sesuai mekanisme, tetapi belum tentu tepat secara substantif.

Kesenjangan literatur yang ingin dijawab artikel ini terletak pada kecenderungan kajian terdahulu yang masih banyak membahas program secara terpisah. Sebagian studi menekankan dampak PKH terhadap konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. Sebagian lain membahas ketepatan sasaran atau akurasi data penerima. Kajian tentang tata kelola kemiskinan juga banyak menyoroti koordinasi dan kapasitas kelembagaan. Namun, belum banyak sintesis yang membaca ketiga persoalan tersebut sebagai satu rangkaian, yaitu fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak. Padahal, ketiganya saling menentukan. Fragmentasi kebijakan melemahkan koordinasi data dan pelaksanaan. Data yang lemah merusak ketepatan sasaran. Sasaran yang tidak tepat membuat evaluasi dampak menjadi bias karena program tidak sepenuhnya diterima oleh kelompok yang paling membutuhkan.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menyusun sintesis literatur yang menghubungkan tiga simpul tersebut dalam satu kerangka analisis implementasi program. Provinsi Riau ditempatkan sebagai konteks penguat, bukan sebagai studi kasus utama. Studi tentang Pekanbaru, Dumai, Rokan Hulu, Kampar, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa persoalan nasional seperti data yang belum mutakhir, salah sasaran, penggunaan bantuan yang tidak sesuai tujuan, variasi dampak PKH, dan lemahnya penyesuaian program terhadap karakter wilayah juga muncul di tingkat daerah. Setiawan et al. (2026), Divarhea dan Mulianto (2025), Saputra et al. (2025), serta Nuraini et al. (2025) memberi dasar bahwa Riau dapat dibaca sebagai cermin daerah untuk memahami bagaimana program pengentasan kemiskinan bekerja dalam konteks implementasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengajukan proposisi analitis bahwa program pengentasan kemiskinan cenderung kurang efektif apabila desain kebijakan tidak terhubung dengan data sasaran yang mutakhir, koordinasi lintas aktor, pengawasan pelaksanaan, dan evaluasi dampak berbasis hasil. Rumusan masalah dalam artikel ini adalah bagaimana fragmentasi kebijakan memengaruhi implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia, bagaimana ketepatan sasaran menentukan efektivitas program bantuan sosial, dan bagaimana evaluasi dampak menunjukkan keberhasilan serta keterbatasan program ketika dibaca dengan konteks Provinsi Riau. Tujuan artikel ini adalah menganalisis implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui review literatur dengan fokus pada fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode review literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif analitis. Metode ini dipilih karena tujuan artikel bukan melakukan pengukuran dampak baru melalui data lapangan, melainkan menyusun sintesis dari berbagai temuan penelitian terdahulu tentang implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Fokus analisis diarahkan pada tiga tema utama, yaitu fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak. Ketiga tema tersebut dipilih karena berhubungan langsung dengan mata kuliah perencanaan, implementasi, dan evaluasi program, serta mampu menjelaskan mengapa keberadaan banyak program pengentasan kemiskinan belum selalu menghasilkan perubahan kesejahteraan yang merata.

Sumber data dalam artikel ini berasal dari 22 artikel jurnal akses terbuka yang telah ditentukan sebagai korpus literatur. Artikel yang digunakan membahas Program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, bantuan pangan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, zakat konsumtif, zakat produktif, tata kelola kemiskinan, koordinasi antarlembaga, dan evaluasi program di tingkat nasional maupun daerah. Sebagian artikel digunakan untuk membangun dasar konseptual mengenai bantuan sosial dan perlindungan sosial, sedangkan sebagian lain digunakan untuk memperkuat konteks daerah, terutama Provinsi Riau. Karena artikel ini merupakan review literatur, Provinsi Riau tidak diposisikan sebagai studi kasus utama, melainkan sebagai konteks penguat untuk membaca variasi implementasi program pada level daerah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pemeriksaan manual terhadap setiap artikel. Pemeriksaan dilakukan dengan mencatat nama penulis, tahun terbit, judul artikel, nama jurnal, metode penelitian, lokasi kajian, temuan utama, serta relevansi artikel dengan fokus kajian. Instrumen analisis yang digunakan adalah matriks review literatur. Matriks ini disusun untuk menghindari penggunaan sitasi yang tidak sesuai dengan isi artikel. Dengan cara tersebut, setiap bodynote yang digunakan dalam pembahasan dapat ditelusuri kembali pada artikel yang menjadi rujukan.

Analisis data dilakukan melalui empat tahap. Tahap pertama adalah reduksi temuan, yaitu memilih bagian artikel yang relevan dengan fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak. Tahap

kedua adalah kategorisasi, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama artikel. Tahap ketiga adalah perbandingan antarartikel untuk melihat persamaan, perbedaan, dan kecenderungan hasil penelitian. Tahap keempat adalah sintesis argumentatif, yaitu menyusun hubungan antara temuan literatur dengan masalah implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia. Artikel ini tidak membuat klaim kausal baru, tetapi menyusun pembacaan kritis atas literatur yang tersedia agar dapat menjelaskan bagaimana program direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi dalam konteks kebijakan pengentasan kemiskinan.

TEMUAN DAN DISKUSI

Pemetaan Literatur tentang Program Pengentasan Kemiskinan

Review terhadap 22 artikel menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak dapat dipahami dari satu sisi saja. Literatur yang dikaji memperlihatkan tiga pola besar. Pertama, program bantuan sosial seperti PKH relatif mampu meringankan beban konsumsi rumah tangga miskin, tetapi dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan perubahan ekonomi jangka panjang tidak selalu konsisten. Kedua, ketepatan sasaran masih menjadi titik lemah karena banyak program bergantung pada data penerima yang tidak selalu mutakhir. Ketiga, pengentasan kemiskinan memerlukan koordinasi lintas aktor karena program yang tersebar di banyak lembaga dapat kehilangan daya ubah jika tidak dikelola dalam satu siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang terhubung.

Tabel 1. Pemetaan Literatur Program Pengentasan Kemiskinan

No	Penulis dan Tahun	Fokus Kajian	Metode	Temuan Utama	Relevansi dengan Artikel
1	Cahyadi et al. (2020)	Dampak jangka panjang PKH di Indonesia	Eksperimental	PKH berdampak pada pendidikan, kesehatan, dan penurunan stunting, tetapi belum mengubah ekonomi rumah tangga secara transformatif.	Evaluasi dampak jangka panjang
2	Hadna dan Askar (2022)	Dampak PKH pada kelompok berpendapatan rendah	Kuantitatif	PKH meningkatkan konsumsi, tetapi kelompok termiskin belum memperoleh manfaat optimal karena desain program belum cukup sesuai kebutuhan.	Kritik desain bantuan
3	Hudang et al. (2024)	Dampak PKH terhadap konsumsi, pendidikan, dan prenatal	Kuantitatif	PKH meningkatkan konsumsi pangan, tetapi tidak signifikan pada capaian pendidikan anak dan kunjungan prenatal.	Dampak program tidak seragam
4	Nuryadin et al. (2023)	Efektivitas bantuan tunai bersyarat di Yogyakarta	Kuantitatif	PKH meningkatkan pengeluaran makanan dan nonmakanan, dengan dampak lebih kuat di pedesaan.	Variasi dampak wilayah
5	Kusumawati (2019)	Ketepatan sasaran program transfer sosial	Kuantitatif	Salah sasaran dipengaruhi perbedaan desa kota, kepemilikan identitas legal, dan kesalahan implementasi.	Ketepatan sasaran
6	Widyaningsih et al. (2023)	Pemutakhiran DTKS di enam daerah	Kualitatif	DTKS tidak selalu dimutakhirkan secara berkala sehingga memicu salah sasaran dan keterlambatan bantuan.	Basis data penerima
7	Sofianto (2020)	Implementasi PKH di Jawa Tengah	Metode campuran	PKH baik secara prosedural, tetapi lemah pada validitas data dan ketepatan penerima.	Batas keberhasilan administratif

8	Indawati (2022)	Penyaluran BST pada masa pandemi	Kualitatif	BST dinilai efektif melalui sasaran, tujuan, dan pemantauan, tetapi tetap menuntut data dan pengawasan yang kuat.	Evaluasi penyaluran bantuan
9	Setiawan et al. (2026)	Pengentasan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti	Review literatur	Pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan data lokal, koordinasi lintas sektor, dan penyesuaian wilayah kepulauan.	Konteks Riau
10	Hakim dan Lubis (2024)	Evaluasi PKH di Bengkalis	Kualitatif	PKH perlu dinilai dari kepatuhan pendidikan dan kesehatan, bukan hanya dari penyaluran dana.	Evaluasi komitmen PKH
11	Divarhea dan Mulianto (2025)	Dampak PKH di Pekanbaru	Kuantitatif	Masih ditemukan salah sasaran, penyalahgunaan dana, dan keluarga layak yang belum masuk penerima.	Ketepatan sasaran Riau
12	Nabila dan Andriyus (2024)	Evaluasi PKH di Kampar	Kualitatif	PKH belum maksimal karena sosialisasi lemah, pendataan kelayakan kurang, dan bantuan belum merata.	Pemerataan penerima
13	Darojatun dan Juliana (2024)	Pelaksanaan PKH di Rokan Hulu	Kualitatif	PKH membantu ekonomi masyarakat miskin, tetapi perlu graduasi mandiri bagi penerima yang sudah mampu.	Keberlanjutan program
14	Prayudi et al. (2023)	Zakat, PKH, dan kemiskinan di Rokan Hulu	Kuantitatif	Zakat konsumtif, zakat produktif, dan PKH berpengaruh simultan, tetapi PKH tidak berpengaruh secara parsial.	Dampak program di Riau
15	Saputra et al. (2025)	Zakat, PKH, BPNT, dan kemiskinan di Pekanbaru	Kuantitatif	Secara simultan berpengaruh signifikan, tetapi PKH tidak berpengaruh negatif signifikan secara parsial.	Evaluasi dampak daerah
16	Rivaldo et al. (2025)	Zakat dan bantuan sosial pangan di Pekanbaru dan Dumai	Kuantitatif	Zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan.	Konteks perkotaan Riau
17	Nuraini et al. (2025)	Zakat dan bantuan sosial pangan di Provinsi Riau	Kuantitatif	Zakat konsumtif dan produktif menurunkan kemiskinan, sedangkan bantuan sosial pangan berhubungan positif dengan kemiskinan.	Konteks Provinsi Riau
18	Rusmaniah (2025)	Penguatan TKPKD dalam penurunan kemiskinan	Kualitatif	Penurunan kemiskinan memerlukan penguatan TKPKD, sinergi program, kolaborasi multipihak, dan integrasi data.	Fragmentasi kebijakan
19	Muallidin (2025)	Model koneksi sosial dalam pengentasan kemiskinan	Kualitatif	Kemiskinan diperkuat oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, rendahnya partisipasi, dan kurangnya konteks lokal.	Tata kelola kolaboratif
20	Anggraini et al. (2025)	Model kebijakan adaptif pengentasan kemiskinan	Review literatur	Kebijakan perlu adaptif, fleksibel, responsif, partisipatif, berbasis data,	Kerangka kebijakan adaptif

				dan didukung koordinasi lintas sektor.	
21	Yuliawati et al. (2025)	Strategi tata kelola kemiskinan di Tasikmalaya	Kualitatif	Tata kelola belum efektif karena kolaborasi program dan koordinasi OPD belum optimal.	Koordinasi kelembagaan
22	Anggraini et al. (2024)	PKH dan relasi sosial gender	Analisis konseptual	PKH belum otomatis memberdayakan perempuan karena kontrol atas sumber daya dan manfaat masih terbatas.	Evaluasi dampak sosial

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa literatur tentang pengentasan kemiskinan bergerak pada dua kecenderungan. Kelompok pertama menilai keberhasilan program dari dampak pada konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Kelompok kedua menilai keberhasilan program dari sisi tata kelola, akurasi data, koordinasi, dan keberlanjutan. Dua kecenderungan ini perlu dipadukan karena program yang berdampak secara statistik belum tentu kuat secara implementatif, sementara program yang tertib secara administratif belum tentu menghasilkan perubahan kesejahteraan yang bermakna.

Fragmentasi Kebijakan dalam Pengentasan Kemiskinan

Fragmentasi kebijakan menjadi salah satu masalah paling mendasar dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Banyak program dirancang dengan tujuan yang sama, yaitu menurunkan beban hidup rumah tangga miskin dan meningkatkan kesejahteraan, tetapi pelaksanaannya tersebar pada berbagai kementerian, dinas, lembaga daerah, pendamping program, pemerintah desa, serta aktor sosial lain. Akibatnya, kemiskinan tidak selalu ditangani sebagai satu masalah terpadu, melainkan sebagai kumpulan kegiatan sektoral yang berjalan dengan logika masing masing. Dalam kondisi seperti ini, keberhasilan program sering lebih mudah dibaca dari sisi penyaluran bantuan, jumlah penerima, atau realisasi anggaran, bukan dari perubahan nyata pada kesejahteraan rumah tangga miskin.

Rusmaniah (2025) menekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan lintas sektor dan lintas program melalui sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, dan pemangku kepentingan lain. Temuan ini penting karena masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu lembaga. Jika program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, perbaikan data, dan pendampingan keluarga miskin bergerak sendiri sendiri, maka kebijakan kehilangan daya integratifnya. Penguatan TKPKD, kolaborasi multipihak, dan integrasi data menjadi penting karena lembaga koordinasi semacam itu dapat menghubungkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam satu arah yang lebih jelas.

Persoalan serupa juga terlihat dalam studi Muallidin (2025), yang menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dapat melemah ketika koordinasi antarlembaga rendah, partisipasi masyarakat terbatas, dan konteks lokal tidak diperhitungkan dalam proses kebijakan. Artinya, fragmentasi bukan hanya terjadi karena banyaknya aktor, tetapi juga karena lemahnya hubungan antaraktor. Dalam program pengentasan kemiskinan, relasi antaraktor menentukan apakah kebijakan mampu menjangkau masalah riil masyarakat atau hanya berhenti sebagai rancangan administratif. Jika masyarakat miskin hanya ditempatkan sebagai penerima pasif, maka program berisiko gagal menangkap kebutuhan yang paling mendesak di tingkat rumah tangga.

Model kebijakan adaptif yang dibahas Anggraini et al. (2025) memberi arah bahwa pengentasan kemiskinan perlu lebih fleksibel, responsif, partisipatif, dan berbasis data. Kebijakan yang terlalu statis akan sulit menjawab perubahan kondisi kemiskinan, terutama ketika rumah tangga miskin menghadapi guncangan ekonomi, perubahan harga pangan, kehilangan pekerjaan, atau hambatan akses layanan. Dalam konteks ini, fragmentasi dapat dikurangi jika pemerintah tidak hanya mengandalkan struktur program yang sudah ada, tetapi juga memperkuat mekanisme pembaruan data, koordinasi lapangan, dan umpan balik dari pelaksana maupun penerima manfaat.

Yuliawati et al. (2025) juga menunjukkan bahwa tata kelola pengentasan kemiskinan belum efektif ketika kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah tidak berjalan optimal. Temuan ini memperjelas bahwa masalah kemiskinan bukan hanya berada pada penerima bantuan, tetapi juga pada kapasitas pemerintah mengelola jaringan kebijakan. Dalam konteks Riau, Setiawan et al. (2026) memperlihatkan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem di Kepulauan Meranti membutuhkan strategi lintas sektor, data lokal,

dan penyesuaian terhadap karakter wilayah kepulauan. Dengan demikian, fragmentasi kebijakan perlu dibaca sebagai kegagalan menghubungkan program, data, aktor, dan konteks wilayah. Program pengentasan kemiskinan baru dapat bekerja lebih efektif jika perencanaan, implementasi, dan evaluasi tidak berjalan terpisah, melainkan saling memberi informasi dalam satu siklus kebijakan yang utuh.

Ketepatan Sasaran dan Problem Data Penerima

Ketepatan sasaran merupakan titik kritis dalam implementasi program pengentasan kemiskinan. Program bantuan sosial dapat dirancang dengan tujuan yang baik, tetapi manfaatnya akan melemah jika penerima yang masuk ke dalam daftar bukan kelompok yang paling membutuhkan. Dalam konteks ini, persoalan utama bukan hanya jumlah anggaran atau besaran bantuan, melainkan kemampuan sistem kebijakan untuk mengenali rumah tangga miskin secara akurat. Ketika keluarga miskin tidak tercatat sebagai penerima, program gagal menjangkau kelompok prioritas. Sebaliknya, ketika keluarga yang relatif mampu tetap masuk sebagai penerima, bantuan kehilangan fungsi redistributifnya.

Kusumawati (2019) menunjukkan bahwa salah sasaran dalam program transfer sosial di Indonesia dapat muncul melalui kesalahan eksklusi dan kesalahan inklusi. Kesalahan eksklusi terjadi ketika kelompok yang layak menerima bantuan justru tidak tercakup, sedangkan kesalahan inklusi terjadi ketika bantuan diterima oleh kelompok yang tidak layak. Temuan ini penting karena ketepatan sasaran bukan sekadar urusan teknis pendataan, tetapi berkaitan langsung dengan keadilan program. Program yang salah sasaran tidak hanya mengurangi efektivitas kebijakan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masalah tersebut berkaitan erat dengan kualitas data penerima. Widyaningsih et al. (2023) menegaskan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi basis penting dalam penentuan calon penerima program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Namun, tidak semua pemerintah daerah melakukan pemutakhiran data secara berkala. Akibatnya, bantuan dapat terlambat disalurkan atau diberikan kepada penerima yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terbaru. Kondisi ini menunjukkan bahwa data kemiskinan bukan dokumen pasif, melainkan instrumen kebijakan yang harus diperbarui terus menerus karena kondisi rumah tangga miskin bersifat dinamis.

Temuan Sofianto (2020) memperlihatkan paradoks implementasi PKH. Dari sisi prosedur dan manajerial, program dapat dinilai berjalan baik. Akan tetapi, dari sisi sasaran, masih ditemukan masalah serius karena data penerima tidak valid. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan administratif tidak selalu sama dengan keberhasilan substantif. Program bisa tersalurkan sesuai jadwal dan mekanisme, tetapi tetap tidak efektif jika penerima tidak tepat. Indawati (2022) juga memperlihatkan pentingnya ketepatan sasaran, pencapaian tujuan, dan pemantauan dalam penyaluran bantuan sosial tunai. Artinya, akurasi data harus didampingi oleh pengawasan pelaksanaan agar bantuan tidak hanya sampai, tetapi benar benar sampai kepada kelompok yang layak.

Dalam konteks Riau, problem ketepatan sasaran juga tampak pada beberapa studi daerah. Divarhea dan Mulianto (2025) menemukan bahwa pelaksanaan PKH di Perhentian Marpoyan Pekanbaru masih menghadapi kendala berupa tidak tepat sasaran, penyalahgunaan dana bantuan, dan adanya keluarga layak yang belum terdata sebagai penerima. Nabila dan Andriyus (2024) juga menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di Desa Kepau Jaya Kampar belum maksimal karena bantuan belum diterima secara merata oleh masyarakat miskin, sosialisasi masih lemah, dan pendataan kelayakan penerima belum kuat. Temuan ini memperlihatkan bahwa masalah data tidak berhenti pada level nasional, tetapi berlanjut sampai desa dan kelurahan.

Dengan demikian, ketepatan sasaran harus dipahami sebagai fondasi implementasi program. Tanpa data yang mutakhir, verifikasi yang kuat, sosialisasi yang jelas, dan pengawasan yang konsisten, program pengentasan kemiskinan berisiko hanya menjadi distribusi bantuan yang tidak sepenuhnya menyentuh akar masalah. Ketepatan sasaran menentukan apakah program benar benar menjangkau warga miskin, atau justru hanya memperpanjang daftar penerima yang tidak lagi sesuai dengan kondisi lapangan.

Evaluasi Dampak Program: Antara Konsumsi, Akses Layanan, dan Perubahan Struktural

Evaluasi dampak program pengentasan kemiskinan tidak cukup berhenti pada pertanyaan apakah bantuan telah disalurkan atau belum. Penyaluran hanya menunjukkan bahwa mekanisme administratif

berjalan. Dampak yang lebih penting justru terlihat dari perubahan yang terjadi setelah bantuan diterima, seperti peningkatan konsumsi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, pengurangan kerentanan, serta kemampuan keluarga miskin keluar dari ketergantungan bantuan. Karena itu, evaluasi program perlu membedakan antara keluaran administratif dan hasil substantif.

Studi Cahyadi et al. (2020) memperlihatkan bahwa PKH memiliki dampak jangka panjang pada sejumlah indikator modal manusia. Program ini berkontribusi terhadap peningkatan persalinan oleh tenaga kesehatan, penurunan anak usia di bawah 15 tahun yang tidak sekolah, dan penurunan stunting. Namun, studi yang sama juga menunjukkan bahwa peningkatan modal manusia belum otomatis menghasilkan perubahan ekonomi rumah tangga yang transformatif. Temuan ini penting karena keberhasilan PKH tidak dapat hanya dilihat dari perubahan perilaku layanan dasar, tetapi juga dari apakah keluarga penerima mampu bergerak menuju kemandirian ekonomi.

Hasil yang lebih hati hati terlihat dalam studi Hudang et al. (2024). PKH terbukti berpengaruh positif terhadap konsumsi pangan, tetapi tidak signifikan terhadap capaian pendidikan anak dan kunjungan prenatal. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan tunai bersyarat lebih mudah berdampak pada kebutuhan konsumsi harian daripada perubahan perilaku yang membutuhkan dukungan layanan, pendampingan, dan pengawasan. Hadna dan Askar (2022) juga memperkuat kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa kelompok pada kuantil kesejahteraan terendah belum sepenuhnya memperoleh manfaat optimal dari PKH. Artinya, program yang secara umum terlihat membantu kelompok miskin tetap dapat menyisakan ketimpangan manfaat di dalam kelompok penerima itu sendiri.

Nuryadin et al. (2023) menunjukkan bahwa PKH mampu meningkatkan konsumsi makanan dan nonmakanan, terutama di wilayah pedesaan. Akan tetapi, variasi dampak antarwilayah memperlihatkan bahwa efektivitas program sangat dipengaruhi konteks lokal. Dalam konteks Riau, Prayudi et al. (2023) menemukan bahwa zakat konsumtif, zakat produktif, dan PKH berpengaruh secara simultan terhadap kemiskinan di Rokan Hulu, tetapi PKH secara parsial tidak berpengaruh. Saputra et al. (2025) juga menunjukkan bahwa di Pekanbaru, PKH tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan BPNT justru berpengaruh positif signifikan. Temuan semacam ini tidak dapat langsung dibaca sebagai kegagalan mutlak, tetapi sebagai tanda bahwa desain bantuan, sasaran, durasi program, dan kualitas implementasi perlu diperiksa lebih dalam.

Rivaldo et al. (2025) dan Nuraini et al. (2025) memberi gambaran lain bahwa zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan dapat berhubungan dengan penurunan kemiskinan pada konteks tertentu. Namun, temuan Nuraini et al. yang menunjukkan bantuan sosial pangan berhubungan positif dengan kemiskinan di Riau memperlihatkan bahwa bantuan pangan bisa saja lebih banyak hadir pada wilayah dengan beban kemiskinan tinggi, bukan otomatis menjadi faktor yang langsung menurunkan kemiskinan. Selain itu, Anggraini et al. (2024) mengingatkan bahwa PKH tidak otomatis memberdayakan perempuan jika akses, kontrol sumber daya, dan manfaat masih terbatas. Dengan demikian, evaluasi dampak perlu bergerak dari sekadar menghitung penerima dan nominal bantuan menuju pembacaan yang lebih substantif tentang perubahan kesejahteraan, kemandirian, dan relasi sosial penerima.

Provinsi Riau sebagai Konteks Penguat Analisis

Provinsi Riau dalam artikel ini tidak ditempatkan sebagai studi kasus utama, tetapi sebagai konteks penguat untuk menunjukkan bahwa persoalan implementasi program pengentasan kemiskinan juga tampak pada level daerah. Beberapa studi di Riau memperlihatkan bahwa masalah nasional seperti ketepatan sasaran, pemutakhiran data, penggunaan bantuan, dan variasi dampak program tidak berhenti pada desain kebijakan pusat, tetapi muncul dalam praktik kabupaten dan kota.

Di Kepulauan Meranti, Setiawan et al. (2026) menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan ekstrem membutuhkan strategi lintas sektor, data lokal yang kuat, dan penyesuaian terhadap karakter wilayah kepulauan. Temuan ini penting karena kemiskinan di daerah tidak selalu dapat ditangani dengan pola seragam. Wilayah kepulauan, wilayah perkotaan, dan wilayah pedesaan memiliki hambatan implementasi yang berbeda. Karena itu, kebijakan yang terlalu umum berisiko gagal membaca kebutuhan penerima secara spesifik.

Studi di Bengkalis, Pekanbaru, Kampar, dan Rokan Hulu juga memperlihatkan variasi persoalan implementasi. Hakim dan Lubis (2024) menekankan bahwa evaluasi PKH perlu melihat kepatuhan keluarga penerima terhadap komitmen pendidikan dan kesehatan. Divarhea dan Mulianto (2025)

menemukan masalah salah sasaran, penyalahgunaan dana, dan keluarga layak yang belum terdata di Pekanbaru. Nabila dan Andriyus (2024) menunjukkan bahwa PKH di Kampar belum maksimal karena bantuan belum merata, sosialisasi lemah, dan pendataan kelayakan penerima belum kuat. Sementara itu, Darojatun dan Juliana (2024) menunjukkan bahwa PKH di Rokan Hulu membantu ekonomi masyarakat miskin, tetapi tetap memerlukan graduasi mandiri bagi penerima yang sudah mampu.

Temuan kuantitatif di Riau juga menunjukkan bahwa dampak program tidak selalu searah. Prayudi et al. (2023) dan Saputra et al. (2025) menemukan bahwa PKH tidak selalu berpengaruh secara parsial terhadap penurunan kemiskinan. Sebaliknya, Rivaldo et al. (2025) dan Nuraini et al. (2025) menunjukkan bahwa zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan dapat berhubungan dengan penurunan kemiskinan pada konteks tertentu. Variasi ini memperkuat argumen bahwa efektivitas program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kesesuaian desain, ketepatan sasaran, kondisi wilayah, dan kualitas implementasi.

Sintesis Teoretis: Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory

Berdasarkan temuan literatur, implementasi program pengentasan kemiskinan dapat dibaca melalui tiga lapis teori. Pada level grand theory, artikel ini berpijak pada teori kebijakan publik dan tata kelola program publik. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai masalah rumah tangga miskin, tetapi sebagai persoalan kemampuan negara merancang kebijakan, mengoordinasikan aktor, mengelola data, dan memastikan program bekerja sesuai tujuan. Dalam kerangka ini, fragmentasi kebijakan menjadi tanda bahwa desain program belum sepenuhnya terhubung dengan kapasitas pelaksanaan dan evaluasi.

Pada level middle range theory, artikel ini menggunakan perspektif implementasi dan evaluasi program sosial. Program pengentasan kemiskinan tidak cukup dinilai dari keberadaan regulasi atau realisasi bantuan, tetapi harus dilihat dari hubungan antara tujuan program, sumber daya, pelaksana, kelompok sasaran, mekanisme pemantauan, dan hasil yang dicapai. Temuan Sofianto (2020) tentang PKH di Jawa Tengah menunjukkan bahwa program dapat berjalan baik secara prosedural, tetapi tetap bermasalah jika data sasaran tidak valid. Hal ini memperlihatkan bahwa keberhasilan administratif belum tentu sama dengan efektivitas program.

Pada level applied theory, artikel ini menempatkan perlindungan sosial, PKH, DTKS, zakat, BPNT, dan bantuan sosial pangan sebagai instrumen konkret pengentasan kemiskinan. Instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, mulai dari meringankan konsumsi, memperluas akses layanan, hingga mendukung penguatan ekonomi rumah tangga miskin. Namun, berbagai temuan menunjukkan bahwa dampaknya tidak otomatis seragam. Karena itu, sintesis utama artikel ini adalah bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan kesinambungan antara perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Program yang efektif bukan hanya program yang tersalurkan, tetapi program yang tepat sasaran, terkoordinasi, adaptif terhadap konteks daerah, dan mampu menunjukkan perubahan kesejahteraan yang dapat diperiksa.

KESIMPULAN

Review literatur ini menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia tidak cukup dinilai dari banyaknya program, jumlah penerima, atau tersalurnya bantuan. Tiga simpul utama yang menentukan efektivitas program adalah fragmentasi kebijakan, ketepatan sasaran, dan evaluasi dampak. Fragmentasi kebijakan muncul ketika program kemiskinan tersebar pada banyak aktor dan lembaga, tetapi tidak selalu terhubung dalam satu siklus perencanaan, implementasi, dan evaluasi yang utuh. Temuan literatur memperlihatkan bahwa koordinasi lintas sektor, integrasi data, dan tata kelola kolaboratif menjadi prasyarat penting agar program tidak berjalan sendiri sendiri sebagai kegiatan administratif.

Ketepatan sasaran menjadi fondasi utama dalam implementasi bantuan sosial. Program yang dirancang dengan baik tetap dapat gagal jika data penerima tidak mutakhir, proses verifikasi lemah, atau pemantauan tidak konsisten. Literatur tentang DTKS, PKH, dan bantuan sosial menunjukkan bahwa salah sasaran tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga melemahkan keadilan distribusi. Pada titik ini, keberhasilan administratif tidak selalu identik dengan keberhasilan substantif. Program dapat tersalurkan sesuai prosedur, tetapi belum tentu menyentuh keluarga miskin yang paling membutuhkan.

Dari sisi evaluasi dampak, program seperti PKH, zakat, BPNT, dan bantuan sosial pangan menunjukkan hasil yang tidak seragam. Sebagian literatur memperlihatkan peningkatan konsumsi dan akses layanan dasar, tetapi dampaknya terhadap penurunan kemiskinan jangka panjang, graduasi mandiri, dan perubahan struktural rumah tangga miskin masih terbatas. Konteks Provinsi Riau memperkuat pembacaan tersebut. Studi di Pekanbaru, Dumai, Kampar, Rokan Hulu, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa masalah nasional seperti data lemah, ketidaktepatan sasaran, variasi dampak program, dan kebutuhan adaptasi wilayah juga muncul pada level daerah.

Keterbatasan artikel ini terletak pada sifatnya sebagai review literatur, sehingga tidak melakukan pengujian empiris baru melalui survei atau wawancara lapangan. Selain itu, Provinsi Riau hanya digunakan sebagai konteks penguat, bukan studi kasus utama. Rekomendasi yang dapat diajukan adalah perlunya pemutakhiran DTKS secara berkala, penguatan koordinasi pusat dan daerah, perbaikan pengawasan penggunaan bantuan, serta evaluasi program berbasis hasil. Program pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak hanya mengejar ketepatan penyaluran, tetapi juga memastikan perubahan nyata pada kesejahteraan, kemandirian, dan daya tahan rumah tangga miskin.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D., Sobri, K. M., Lionardo, A., & Putra, R. (2025). Adaptive policy model in poverty alleviation in Indonesia. *Mimbar, 41*(1), 111–122. https://doi.org/10.29313/mimbar.v41i1.6321

Anggraini, N. W., Khairiyah, A., & Hasanah, F. (2024). Program Keluarga Harapan (PKH): Examining the social relation approach on poverty alleviation policies in Indonesia. In A. Hidayat et al. (Eds.), *Proceedings of the International Conference on Multidisciplinary Studies (ICoMSi 2023)*, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 829*, 273–286. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-228-6_22

Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative impacts of conditional cash transfer programs: Experimental evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy, 12*(4), 88–110. https://doi.org/10.1257/pol.20190245

Darojatun, Y. B., & Juliana, S. (2024). Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Bukit Intan Makmur Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 1*(1), 55–62.

Divarhea, D. R. S., & Mulianto, B. (2025). Dampak Program Keluarga Harapan (PKH) pada masyarakat Kelurahan Perhentian Marpoyan Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 2*(3), 472–476.

Hadna, A. H., & Askar, M. W. (2022). The impact of conditional cash transfers on low income individuals in Indonesia. *Advances in Southeast Asian Studies, 15*(1), 23–41. https://doi.org/10.14764/10.ASEAS-0067

Hakim, R., & Lubis, E. F. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. *Journal of Public Administration Review, 1*(2), 1178–1200.

Hudang, A. K., Hariyanto, T., & Handoyo, R. D. (2024). Does conditional cash transfer deliver? The Indonesian evidence on PKH. *Business: Theory and Practice, 25*(2), 447–457. https://doi.org/10.3846/btp.2024.13865

Indawati, R. (2022). Efektivitas penyaluran program Bantuan Sosial Tunai (BST) di masa pandemi Covid-19 di Kelurahan Kalabbirang Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar. *Jurnal Administrasi Negara, 28*(1), 24–41.

Kusumawati, A. S. (2019). The effectiveness of targeting social transfer programs in Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning, 3*(3), 282–297.

Muallidin, I. (2025). Poverty alleviation: The perspective of the social connection model in Sumbawa Regency. *Jurnal Bina Praja, 17*(1), 223–240. https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.223-240

Nabila, P., & Andriyus. (2024). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *JMP: Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, 1*(4), 697–703.

Nuraini, Rosyetti, & Sidabalok, S. (2025). Analisis distribusi zakat konsumtif, zakat produktif dan Bantuan Sosial Pangan (BSP) terhadap kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2019–2023. *Jurnal Daya Saing, 11*(2), 359–369.

Nuryadin, D., Sultan, Umaroh, R., Darpito, S. H., Rahmanda, G. A., & Cesario, I. B. P. (2023). Examining the efficacy of conditional cash transfer programs in reducing poverty in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Economic Development, 48*(4), 141–153.

Prayudi, A., Rosyetti, & Misdawita. (2023). Pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif, dan Program Keluarga Harapan terhadap kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 6*(2), 841–855.

Rivaldo, M., Rosyetti, & Sidabalok, S. (2025). Pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif, dan bantuan sosial pangan terhadap kemiskinan di Pekanbaru dan Dumai. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 8*(1), 279–287.

Rusmaniah. (2025). Penguatan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dalam menurunkan angka kemiskinan di Kabupaten Natuna. *JAAKFE UNTAN, 14*(1), 1–20. https://doi.org/10.26418/jaakfe.v14i1.96629

Saputra, A., Rosyetti, & Pailis, E. A. (2025). Pengaruh zakat konsumtif, zakat produktif, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Pangan Non Tunai terhadap kemiskinan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 8*(1), 411–423.

Setiawan, R., Asrinaldi, Andrianus, F., & Putera, R. E. (2026). Effectiveness of extreme poverty alleviation implementation in Meranti Islands Regency. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 12*(1), 163–174. https://doi.org/10.25299/jiap.2026.27410

Sofianto, A. (2020). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. *Sosio Konsepsia, 10*(1), 14–31. https://doi.org/10.33007/ska.v10i1.2091

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2023). Urgensi memutakhirkan data terpadu kemiskinan secara berkelanjutan dan berkualitas: Pembelajaran dari studi kasus di enam daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 31*(2), 179–200. https://doi.org/10.55981/jep.2023.1013

Yuliawati, F., Larasati, E., & Lituhayu, D. (2025). Governance strategies to alleviate poverty in Tasikmalaya City. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11*(1), 146–161. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v11i1.54905